

Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian, Model-model dan Penerapannya Dalam Contoh studi kasus

Muhammad Sinathria Maharaksa¹, Hary Dermawan Triharjono², Fadla Nur Fadilah³, Sadira Az Zahra Kania Solihat⁴, Siti Mutia Firda⁵, Zahra Aulia Hidayat⁶

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: ¹Maharaksaaa@gmail.com, ²dermawanhary14@gmail.com, ³fadlanurfadilah14@gmail.com, ⁴sadiraazzahr05@gmail.com,
⁵mutiafirda06@gmail.com, ⁶zahraauliahidayat@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kompleks yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik, termasuk peran aktor-aktor utama, sumber daya yang tersedia, serta hambatan yang mungkin terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan publik, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, resistensi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Hasil dari penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga menyarankan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif agar kebijakan yang diimplementasikan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: kebijakan publik, implementasi, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Perintah publik lahir dari kebutuhan dan masalah masyarakat. Keputusan pegawai negeri disebut pemangku kepentingan. Stakeholder dalam politik publik adalah pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip kepentingan masyarakat. (Desrinelti et al., 2021) Namun, penyusunan kebijakan yang baik saja tidak cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Proses implementasi kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, serta sektor swasta dan masyarakat. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Oleh karena itu, tantangan utama dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang muncul, seperti keterbatasan sumber daya, ketidakselarasan antara tujuan kebijakan dengan kepentingan lokal, serta resistensi dari kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami dinamika yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder lainnya, serta bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi hasil dari kebijakan yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memberikan rekomendasi mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola dan memperbaiki implementasi kebijakan publik, agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai secara optimal.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data melalui penelaahan mendalam terhadap literatur dan teori yang relevan. Studi pustaka mencakup serangkaian tindakan seperti pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan literatur. Data dikumpulkan dengan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan temuan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, bahan pustaka yang diperoleh dianalisis secara kritis dan menyeluruh. Ini dilakukan untuk mendukung proposal dan mendukung ide-ide yang dibahas dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini membahas tiga poin utama yang didasarkan dari referensi-referensi yang relevan dari implementasi Kebijakan Publik, Tiga poin tersebut yaitu: 1. Pengertian implementasi Kebijakan Publik, 2. model dan pendekatan implementasi Kebijakan Publik, 3. studi kasus implementasi kebijakan publik

Pengertian implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah alat strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, ekonomi, maupun politik yang dihadapi oleh masyarakat. Secara etimologis, istilah "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*, yang berarti menyediakan sarana untuk menjalankan sesuatu, serta *to practical effect*, yang mengacu pada menimbulkan suatu efek atau dampak. (I. D. Kurniati et al., 2015) Pedoman ini diimplementasikan pada tingkat yang lebih kuat, seperti yang menerjemahkan pedoman ke dalam implementasi program atau rencana teknis teknis dan operasional. (Nirmala & Purwanti, 2021) Oleh karena itu, implementasi berkaitan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, namun bisa juga berupa perintah eksekutif, petunjuk pelaksanaan, atau keputusan dari lembaga peradilan. (Meutia, n.d.)

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam siklus kebijakan publik, yang esensinya adalah memastikan agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat tercapai sesuai tujuannya. Biasanya, implementasi dilakukan setelah kebijakan dirumuskan secara jelas dan terarah. (Pramono, 2020) Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan lanjutan dari keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini mencakup upaya untuk mengubah keputusan tersebut menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, sekaligus melanjutkan usaha-usaha untuk mewujudkan perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan oleh kebijakan. Tindakan ini dilakukan oleh organisasi publik yang memiliki tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan tersebut. (Dewi, 2019) Di Indonesia, ada salah satu pedoman produk disabilitas di sektor perburuhan, dan kelahiran hukum kreativitas buruh, yang telah sangat ditolak oleh semua lingkaran. Perkembangan ini mencakup situasi pengangguran yang semakin meningkat sehubungan dengan pedoman dan undang-undang mengenai keterbatasan kontrak kerja, salah satu produk pemerintah. Hasilnya termasuk ketidaknyamanan dan kerugian lainnya. (Kristian, 2023)

Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai upaya pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dampak dan manfaat dari suatu kebijakan dapat terlihat secara nyata setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. (Suaib, 2016) Implementasi adalah tahap eksekusi atau pelaksanaan yang mengikuti proses perumusan kebijakan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan publik merupakan tindakan konkret dari suatu keputusan yang telah dirumuskan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan memberikan jawaban atas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat. Dalam proses kebijakan publik, implementasi menempati posisi sebagai tahap praktis, yang membedakannya dari tahap perumusan kebijakan yang bersifat lebih teoritis.

Model dan Pendekatan Implementasi kebijakan

Menurut Sabatier terdapat dua model yang terpacu dalam Tahapan Implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan *bottom up* kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down* sedangkan model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan kelembagaan. (Akib & Tarigan, 2008)

Model Top down

Pendekatan ini menerapkan pola pikir dari tingkat atas ke bawah dengan memetakan implementasi di tingkat bawah guna menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. (Ningsih, 2014) Pendekatan ini kerap disebut sebagai "policy centered" karena berfokus pada kebijakan itu sendiri dan berupaya mengungkap fakta-fakta mengenai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya saat diimplementasikan. Pendekatan ini cenderung menyoroti berbagai persoalan, baik hambatan maupun kegagalan, yang muncul dalam pelaksanaan suatu kebijakan, serta mengaitkannya dengan sejumlah faktor yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun Langkah-langkah dalam pendekatan top-down umumnya meliputi:

- Menentukan kebijakan mana yang akan dianalisis;
- Menelaah dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan guna menemukan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan secara formal;
- Mengkaji bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang dijadikan alat atau sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
- Mengevaluasi apakah keluaran tersebut telah diterima dengan baik oleh kelompok yang menjadi target kebijakan, sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku;
- Menelusuri apakah kelompok sasaran benar-benar merasakan manfaat dari keluaran kebijakan itu;
- Menganalisis apakah ada perubahan atau dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan hasil dari kebijakan yang diberikan. Selanjutnya, analisis ini digunakan untuk menilai apakah dampak tersebut turut mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut, pendekatan top-down dinilai lebih sesuai untuk mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan suatu kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut benar-benar bisa diwujudkan di lapangan.

Model bottom up

Pendekatan bottom-up diperkenalkan oleh sejumlah peneliti generasi kedua, seperti Elmore (1978, 1979), Lipsky (1971), Berman (1978), serta Hjern, Hanf, dan Porter (1978), yang muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sebelumnya. (Kasmad & Terbuka, 2018) Mereka kemudian merumuskan pendekatan baru yang menitikberatkan pada pentingnya peran aktor pelaksana di tingkat bawah. Pendekatan ini menekankan pentingnya dua elemen utama dalam pelaksanaan kebijakan, yakni birokrat lapangan (street-level bureaucrats) dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan (target group).

Pendukung pendekatan ini berargumen bahwa birokrat di lapangan memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama karena mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan langsung kebijakan baik dalam bentuk layanan kepada publik maupun distribusi manfaat seperti bantuan, subsidi, atau hibah. Peran mereka menjadi sangat penting karena berada pada titik akhir dalam rantai implementasi.

Para pendukung pendekatan bottom-up (disebut juga bottom-uppers) menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok sasaran sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan. Hal ini sering kali terabaikan oleh para pendukung pendekatan top-down (top-downers), yang cenderung melihat proses kebijakan dari sudut pandang otoritas pusat ke bawah.

Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan oleh para peneliti generasi kedua yang memakai pendekatan bottom-up biasanya meliputi:

- a. Mengidentifikasi para pelaku dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat akar rumput;
- b. Menggali pemahaman para pelaku tersebut mengenai kebijakan yang mereka jalankan serta mengetahui alasan mereka terlibat, melalui proses pengumpulan data;
- c. Menelusuri hubungan antara para pelaku di tingkat bawah dengan pihak-pihak lain di tingkatan yang lebih tinggi;
- d. Melanjutkan pemetaan ke tingkat kepemimpinan yang lebih atas dengan mengumpulkan informasi serupa;
- e. Terakhir, pemetaan dilakukan hingga mencapai tingkat tertinggi, yakni para pembuat kebijakan.

Dengan pola penelitian seperti yang telah dijelaskan, tujuan dari studi implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan berbeda dari model top-down adalah untuk memungkinkan pendekatan bottom-up mengidentifikasi jaringan pelaksana yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai tingkatan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk mengungkap serta memetakan motif ekonomi dan politik dari para aktor yang terlibat dalam proses implementasi.

Studi kasus dalam implementasi Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan

Publik di Kota Bandung

Dalam perkembangan E-Government, terdapat berbagai elemen penting yang menjadi kunci utama keberhasilannya, salah satunya adalah adanya komitmen untuk melakukan pembangunan. Implementasi E-Government merupakan hasil dari kebijakan yang telah disepakati oleh pemerintah, khususnya di tingkat pusat, dengan tujuan agar pelaksanaannya mudah dipahami masyarakat, sederhana dalam penerapan, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kebijakan ini juga merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, pemerintah juga dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di Kota Bandung, pengembangan E-Government dinilai penting. Namun, secara umum, sistem informasi yang tersedia masih kurang diminati masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kesulitan dalam memahami cara kerja teknologi serta kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai sistem yang diluncurkan.

Meski demikian, implementasi kebijakan E-Government di Kota Bandung telah menunjukkan berbagai hasil yang beragam, khususnya dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Kota Bandung telah menyediakan layanan informasi berbasis web melalui situs resmi <https://www.bandung.go.id> yang memuat berbagai informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti bidang pendidikan dan kebudayaan, layanan kesehatan, transportasi, pelayanan informasi publik, dan lain sebagainya. Contohnya adalah sistem Simdik (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) yang berisi informasi terkait passing grade, daya tampung siswa, jumlah kelas, dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula sistem informasi kesehatan yang mencakup data layanan puskesmas dan rumah sakit di Kota Bandung, termasuk informasi ketersediaan ruang perawatan dan fasilitas BPJS.

Layanan lainnya mencakup informasi infrastruktur dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU), seperti kondisi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum (PJU), serta sumber daya air. Dari sisi transparansi, implementasi E-Government di Kota Bandung dinilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Provinsi Jawa Barat dengan nilai 80,30 persen. Penghargaan ini telah diraih Kota Bandung selama empat tahun berturut-turut sejak 2018 hingga 2022. (P. S. Kurniati et al., 2023)

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk merealisasikan keputusan menjadi tindakan nyata guna menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Proses ini mencakup penerjemahan kebijakan menjadi program operasional yang melibatkan berbagai aktor, baik dari level pembuat kebijakan maupun pelaksana di lapangan. Terdapat dua pendekatan utama dalam implementasi, yaitu model top-down yang menekankan arah kebijakan dari atas ke bawah, dan model bottom-up yang menekankan peran aktif aktor pelaksana di tingkat bawah serta kelompok sasaran. Studi kasus implementasi E-Government di Kota Bandung menunjukkan bagaimana kebijakan nasional dapat diadaptasi secara lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem informasi digital. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya literasi teknologi dan minimnya sosialisasi, Kota Bandung berhasil mencapai kemajuan, antara lain dengan penyediaan layanan informasi publik berbasis web serta pengakuan dari lembaga audit nasional. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, pelaksana, teknologi, dan partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kami menyusun artikel ini. Bapak Dr. Dian Hendriana, S.I.P., M.A.P., dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Publik, atas bimbingan, arahan, dan pengetahuan yang dia berikan selama kuliah dan selama penulisan artikel ini. Selain itu, penulis berterima kasih kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah memberikan kontribusi dan berkolaborasi untuk mengembangkan gagasan dan materi artikel ini. Jangan lupa bahwa penulis mengapresiasi dukungan moral dan dorongan yang diberikan oleh keluarga tercinta. Semoga tulisan ini bermanfaat dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal*, 1(8), 1–19.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). *Kebijakan publik : konsep pelaksanaan*. 6(1), 83–88.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.
- Kasmad, R., & Terbuka, U. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*. September.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2015). *Buku Ajar*.
- Kurniati, P. S., Gislawati, R. T., Safitri, F. N., Lutpi, A. J., Studi, P., Pemerintahan, I., Indonesia, U. K., Bandung, K., & Publik, P. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM*. 9(November), 875–886.
- Meutia, I. F. (n.d.). *Publik*.
- Ningsih, I. A. T. K. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan Di Kota Surakarta*. 17–72. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/42788%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/42788/MTQ2NDI4/Implementasi-Kebijakan-Pengembangan-Kota-Layak-Anak-Pada-Bidang-Pendidikan-Di-Kota-Surakarta-cover.pdf>
- Nirmala, I., & Purwanti, U. (2021). Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Di Kota Palembang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 11(1), 73–77. <https://doi.org/10.33592/jiia.v11i1.1455>
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.